

**KONTRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
DI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) TERHADAP
PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KAPITA
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI



OLEH:
BURHANUDDIN BS
105951100516

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

**KONTRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DI HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) TERHADAP
PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KAPITA
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

**BURHANUDDIN BS
NIM: 105951100516**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan
Strata Satu (S-1)

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

21/04/2021

1 cap
Sub-Alumni

R/0021/HUT/21 CD
BUR
k'

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Masyarakat
Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nama : Burhanuddin Bs

Nim : 105951100516

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Muthmainnah, S.Hut., M.Hut.,

NIDN: 1183519

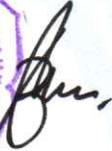

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut.M.P,IPM

NIDN.0907028202

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan


Dr. H. Burhanuddin, S.Pi., M.P

NIDN. 0915067202


Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM

NIDN. 0011077101

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa
Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nama : Burhanuddin Bs

Nim : 105951100516

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Muthmainnah, S.Hut., M.Hut

Pembimbing I

(.....)

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P, IPM

Pembimbing II

(.....)

Dr.Irma Sribianti, S.Hut., M.P

Penguji I

(.....)

Andi Azis Abdullah, S.Hut., M.P

Penguji II

(.....)

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

KONTRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO

Adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau kutip dari karya yang di terbitkan maupun tidak di terbitkan dari penulis lain telah di sebut dalam teks dan di camtumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, Februari 2021

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebut sumber.*
 - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,*
 - b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Muhammadiyah Makassar*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Universitas Muhammadiyah Makassar*



ABSTRAK

BURHANUDDIN BS 105951100516. Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto di bimbing oleh **Muthmainnah dan Hasanuddin Molo.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kapita terhadap pendapatan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, teknik wawancara terhadap 52 orang responden dengan metode sensus dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi HHBK berupa jambu mete, bambu, kunyit dan kemiri. Kontribusi HHBK jambu mete Rp. 301.410.000/Tahun, bambu Rp. 6.105.000/Tahun, kunyit Rp. 6.512.000/Tahun dan kemiri Rp.87.246.000/Tahun. Sehingga total kontribusi HHBK Rp. 404.273.000/Tahun.

Kata Kunci: *Kontribusi, Hutan Kemasyarakatan*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini merupakan proses pembelajaran penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam dunia nyata. Penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kealpaan yang telah dilakukan selama melakukan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, saran, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi kendala itu dapat diselesaikan dengan baik berkat arahan dan bimbingan yang senantiasa membimbing, memotivasi dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan , doa dan motivasi kepada penulis.
2. Dr.H. Burhanuddin, S.Pi., M.P selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr.Ir.Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM selaku ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Muthmainnah, S.Hut., M.Hut sebagai dosen Pembimbing I dan Ayahanda Dr.Ir Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritikan dan nasehat selama proses penyusunan berlangsung demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Ibunda Dr.Irma Sribianti, S.Hut., M.P sebagai penguji I dan Ayahanda Andi Aziz Abdullah, S.Hut., M.P sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Kapita yang ikut terlibat selama proses penelitian berlangsung hingga skripsi ini selesai.
8. Terima kasih kepada teman-teman angkatan Kehutanan yang selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan Lindung	4
2.2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	5
2.2.1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan (HKm)	5
2.2.2. Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	5
2.3. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7
2.4. Peranan HHBK	9

2.4.1. Peranan HHBK Terhadap Aspek Ekologis	9
2.4.2. Peranan HHBK Terhadap Ekonomi Rumah Tangga	9
2.4.3. Peranan HHBK Terhadap Pembangunan Wilayah	10
2.5. Ketergantungan Masyarakat Terhadap HHBK.....	10
2.6. Pemanfaatan HHBK	11
2.7. Kerangka Pikir.....	12
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	14
3.2 Objek dan Alat Penelitian.....	14
3.3 Populasi dan Sampel.....	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.5 Jenis Data.....	15
3.6 Analisis Data.....	16
IV. KEADAAN UMUM LOKASI	
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	19
4.1.1 Batas Batas Administrasi.....	19
4.1.2 Luas Wilayah Administratif.....	20
4.2 Sejarah dan Asal Usul Desa.....	22
4.3 Sarana dan Prasarana Umum Desa.....	23
4.3.1 Bangunan Pemerintah Desa.....	25
4.3.2 Bangunan Sekolah.....	25
4.3.3 Jalan Desa.....	26
4.4 Kelembagaan Desa	26

4.9 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kapita	39
--	----

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Petani Hutan Kemasyarakatan.....	30
5.1.1 Umur.....	30
5.1.2 Pendidikan	31
5.2 Pendapatan Petani Dari HKm.....	32
5.3 Pendapatan Petani Diluar HKm.....	34
5.3 Kontribusi Pendapatan HHBK Terhadap Total Pendapatan.....	35

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Objek Bangunan Dan Peruntukan Lahan.....	21
2.	Pembagian Wilayah Administratif Desa Kapita.....	22
3.	Alur Sejarah Ringkas Desa Kapita.....	23
4.	Umur Responden di Desa Kapita.....	29
5.	Tingkat Pendidikan Responden di Desa Kapita.....	30
6.	Pendapatan Petani Dari HKm di Desa Kapita.....	32
7.	Pendapatan Petani Dari HHBK di Desa Kapita.....	33
8.	Pendapatan Petani Diluar HKm di Desa Kapita.....	33
9.	Kontribusi Pendapatan HHBK Terhadap Total Pendapatan di Desa Kapita.....	34

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Diagram Alir Kerangka Pikir Kontribusi HHBK.....	13
2.	Gambaran Sketsa Peta Wilayah Desa Kapita.....	20
3.	Hubungan Kelembagaan Desa.....	27
4.	Struktur Organisasi Desa.....	28
5.	Wawancara Responden.....	66
6.	Dokumentasi Jambu Mete.....	67
7.	Dokumentasi Bambu.....	67
8.	Dokumentasi Kunyit.....	68
9.	Dokumentasi Kemiri.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner Penelitian.....	40
2.	Karakteristik Responden.....	42
3.	Penerimaan Petani dari HHBK.....	44
4.	Pengeluaran Petani dari HHBK.....	47
5.	Pendapatan Petani dari HKm.....	53
6.	Pendapatan Petani diluar HKm.....	55
7.	Surat Izin Penelitian Dari LP3M.....	60
8.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal.....	63
9.	SK Kelompok Tani.....	63
10.	Dokumentasi Penelitian.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu bagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan dan keindahan. (Hidayat, 2008).

Hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya merupakan suatu bagian tidak dapat di pisahkan. Secara terus-menerus segala aktifitas kehidupan masyarakat baik secara langsung (mengambil hasil hutan), maupun tidak langsung (berladang) sangat berlangsung pada kelestarian hutan. Selain itu, hutan juga dapat memberikan penghasilan tambahan berupa hasil hutan bukan kayu, seperti berburu, menangkap ikan, madu lebah, jernang, rotan, gaharu, sarang burung walet, dan lain-lain sebagainya. (Fauzi, 2008).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau *Non Timber Forest Product* (NTFP) memiliki nilai yang sangat strategis, HHBK merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung oleh masyarakat di sekitar hutan. Keanekaragaman jenis hasil hutan bukan kayu yang di manfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan di mana sebagian ada yang di manfaatkan secara komsumtif, sehingga sulit untuk menilai secara tepat sejauh

mana sebenarnya kontribusi hasil hutan dan bukan kayu bagi kehidupan masyarakat.

Pemungutan HHBK tidak memerlukan perizinan yang rumit sebagaimana dalam pemungutan hasil hutan kayu (*timber*), masyarakat hutan (masyarakat yang tinggal di sekitar hutan) umumnya bebas memungut dan memanfaatkan HHBK dari dalam hutan. Masyarakat tidak dilarang memungut dan memanfaatkan HHBK baik di dalam hutan produksi maupun hutan lindung, kecuali di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Departemen Kehutanan 1990). Oleh karena itu, selain menjadi sumber devisa bagi negara, HHBK seperti rotan, daging binatang, madu, damar, gaharu, getah, berbagai macam minyak tumbuhan, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sebuah proses perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah proses maka konsep HKm ini juga tidak memiliki sebuah sistem atau definisi yang baku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat dan sistem sosial ekonomi, serta kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Hutan kemasyarakatan adalah pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat. (Soemarwoto, 2000).

Salah satu Desa di Kabupaten Jeneponto yang memiliki HKm adalah Desa Kapita yang memiliki luas ±402 Ha yang di dalamnya memiliki HHBK yaitu, jambu mete, bambu, kunyit, kemiri. Desa Kapita berdekatan langsung dengan kawasan hutan. Hampir semua penduduknya berprofesi sebagai petani ladang. Selain sebagai petani ladang, sebagian besar masyarakatnya juga menggantungkan hidup dari hasil hutan.

Penelitian yang dilakukan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ini untuk melihat seberapa besar kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, seberapa besar kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kapita terhadap pendapatan masyarakat?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kapita terhadap pendapatan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terhadap pendapatan masyarakat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

2. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Lindung

Menurut UU No 41 Tahun 1999, bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pengelolaan hutan lindung diatur dalam PP No. Tahun 2007 dan PP No. 3 Tahun 2008. Pengelolaan meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung, perlindungan hutan, dan konservasi alam di hutan lindung. Pengelolaan kawasan hutan lindung penting karena upaya pengelolaan ini bertujuan untuk.

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Menurut PP No. 44 Tahun 2004, ada beberapa kriteria sebagai syarat penetapan kawasan lindung, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih.
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%.
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air
6. Kawasan hutan yang mempunyai daerah perlindungan pantai.

2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

2.2.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut Permenhut No. 88/Menhut-II/2014 HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya di tujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pasal 6 pasal 7 menerangkan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan sebagai area kerja HKm adalah kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi. Ketentuan kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai area kerja hutan kemasyarakatan yaitu belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

2.2.2 Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut Budiono (2011) sosialisai dan fasilitasi merupakan kewajiban dari pemerintah, oleh karena masyarakat petani tepi hutan berhak mendapatkan layanan fasilitas dari pemerintah. Fasilitas sebagai petani HKm dapat berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan Permenhut Nomor 37 tahun 2007 bagian kedua Pasal 12 Ayat 1 dituliskan bahwa fasilitas bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok.
- b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
- f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal.
- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam pengembangan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Menurut Watala (2009), perangkat hukum tentang HKm itu kemudian revisi dengan lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/ Kpts-II/1998. Dalam keputusan tersebut terdapat beberapa prinsip pengelolaan HKm sebagai berikut :

- a. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.
- b. Masyarakat sebagai pengambilan keputusan dan menentukan sistem penguasaan.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.

- d. Adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak.
- e. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat.
- f. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya.

2.3 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hasil hutan bukan kayu merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Peranan HHBK sudah dirasakan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan, namun sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas yang dihasilkan masih jauh dari standar diharapkan dan harganya yang masih rendah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu mengatur program pengembangan HHBK melalui agroforestri, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan secara berkesinambungan bersama masyarakat sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat yang kompetitif (Njurumana dan Butarbutar, 2008).

Produk HHBK memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan nilai ekonomi lahan hutan. Lima komoditas utama pengembangan HHBK : rotan, bambu, lebah madu, gaharu dan ulat sutera (Kaban 2009).

Berdasarkan penelusuran pustaka, paling tidak terdapat 9 (sembilan) fungsi dan peran hutan, yaitu :

1. Menghasilkan kayu industri (*industrial wood*), untuk *plywood*, *pulp*, rayon dll.
2. Menghasilkan kayu bakar dan arang (*fuel wood and charcoal*).
3. Menghasilkan hasil hutan kayu (*non-wood forest product*).
4. Menyediakan lahan untuk pemukiman manusia (*human settlement*).
5. Menyediakan lahan untuk lahan pertanian (*agriculture land*).

6. Memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam.
7. Tempat penyimpanan karbon (*carbon storage*).
8. Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan nabati (*biodiversity and habitat preservation*).
9. Selain peran dan fungsi diatas hutan memiliki nilai kontribusi dalam membangun peradaban manusia yakni nilai sosial (Tim Pengkajian Hukum, 2011).

Secara ekologis HHBK memiliki perbedaan fungsi dengan hasil hutan kayu, karena sebagian besar HHBK merupakan bagian dari pohon. Menurut UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, disebutkan bahwa HHBK adalah hasil hutan hayati maupun non hayati atau menurut FAO (2000) adalah barang yang dihasilkan benda hayati selain kayu yang berasal dari hutan atau lahan sejenis. Adapun HHBK yang dimanfaatkan dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, menurut Sumadiwangsa (2000) dikutip oleh Sudarmalik (2006) dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Getah-getahan : getah jelutung, getah merah, getah balam, getah karet alam dan lain-lain,
2. Tanin : pinang, gambir, *rhizophora*, *bruguera*, dan lain-lain,
3. Resin : gaharu, kemedangan, jernang, damar mata kucing, damar batu, damar rasak, kemenyan dan lain-lain,
4. Minyak astiri : minyak gaharu, minyak kayu putih, minyak keruing, minyak lawang, minyak kayu manis,

5. Madu : *Apis dorsata*, *Apis millifera*,
6. Rotan dan bambu : segala jenis rotan, bambu dan nibung,
7. Penghasil karbohidrat : sagu, aren, nipah, sukun dan lain-lain,
8. Hasil hewan : sutra alam, lilin lebah, aneka hewan yang tidak dilindungi,
9. Tumbuhan obat dan tanaman hias : aneka tumbuhan obat dari hutan, anggrek hutan, palma dan lain-lain.

2.4 Peranan HHBK

Menurut Sudarmalik (2006) tanaman penghasil HHBK memiliki peran tidak saja pada aspek ekologis dan ekonomis, tetapi juga sosial budaya. Secara umum peranan HHBK dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Peranan HHBK terhadap aspek ekologis

Dalam ekosistem hutan, HHBK merupakan sebagian dari ekosistem hutan. Beberapa hasil HHBK diperoleh dari hasil pohon, misalnya getah-getahan, tanin resin, dan minyak astiri. Sedangkan selebhnya dari palm, hasil satwa atau anggrek. Untuk pohon seperti gaharu (*Aquilaria malaccensis*), dalam ekosistem memiliki peranan sebagai pohon dominan dengan ketinggian mencapai 30-40 meter. Palm berupa sagu, nipah, dll. Merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi menjaga abrasi oleh sungai atau laut.

2.4.2 Peranan HHBK terhadap ekonomi rumah tangga

Seperti yang disebutkan diatas bahwa HHBK dapat menjaga adanya kestabilan pendapatan dan resiliensi (kekayaan) terhadap perubahan yang terjadi diluar sistem hutan rakyat. Resiliensin adalah suatu tingkat kelenturan dari sumber pendapatan terhadap adanya perubahan pasar. Contohnya adanya

perubahan nilai tukar mata uang. Pada saat terjadi krisis moneter, HHBK memiliki peran yang besar terhadap pendapatan rumah tangga dan devisa negara, karena HHBK tidak menggunakan komponen impor dalam memproduksi hasil. Dengan efisiensi penggunaan lahan yang tinggi dan diversifikasi produksi maka kontribusi terhadap pendapatan juga semakin besar.

2.4.3 Peranan HHBK terhadap pembangunan wilayah

Dalam pembangunan pedesaan maka kontribusi terbesar dalam menggerakkan pembangunan adalah dari sektor pertanian dan kehutanan. Dari beberapa pole pengelolaan hutan rakyat yang ada maka hasil dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan desa dan pembangunan wilayah. Dengan pengaturan terhadap HHBK baik dari proses produksi, pengolahan dan pemasaran, semua dapat dilakukan oleh masyarakat, sehingga *income* (pendapatan) dari kegiatan tersebut masuk dalam wilayah produsen.

2.5 Ketergantungan Masyarakat Terhadap HHBK

Manusia dan hutan memiliki hubungan yang unik, dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem hutan itu sendiri. Hubungan timbal balik antara manusia dan hutan merupakan interaksi yang saling mempengaruhi. Jika hutan rusak maka kehidupan manusia terancam, sebaliknya jika manusia terpenuhi kesejahteraannya maka kelestarian hutan terjaga pula. Tingginya nilai manfaat hutan bagi masyarakat berimplikasi pada ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa liar. Cara

hidup tradisional disertai mahalanya bahan bakar minyak menyebabkan penggunaan kayu sebagai bahan bakar masih sangat populer dikalangan masyarakat akan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan (*Dracontomelon spp*), sagu, (*Imetroxylon sagoo*), pala (*Myristica lepidota*) dan lainnya sangat tinggi (Nurrani dan Tabba, 2013).

2.6 Pemanfaatan HHBK

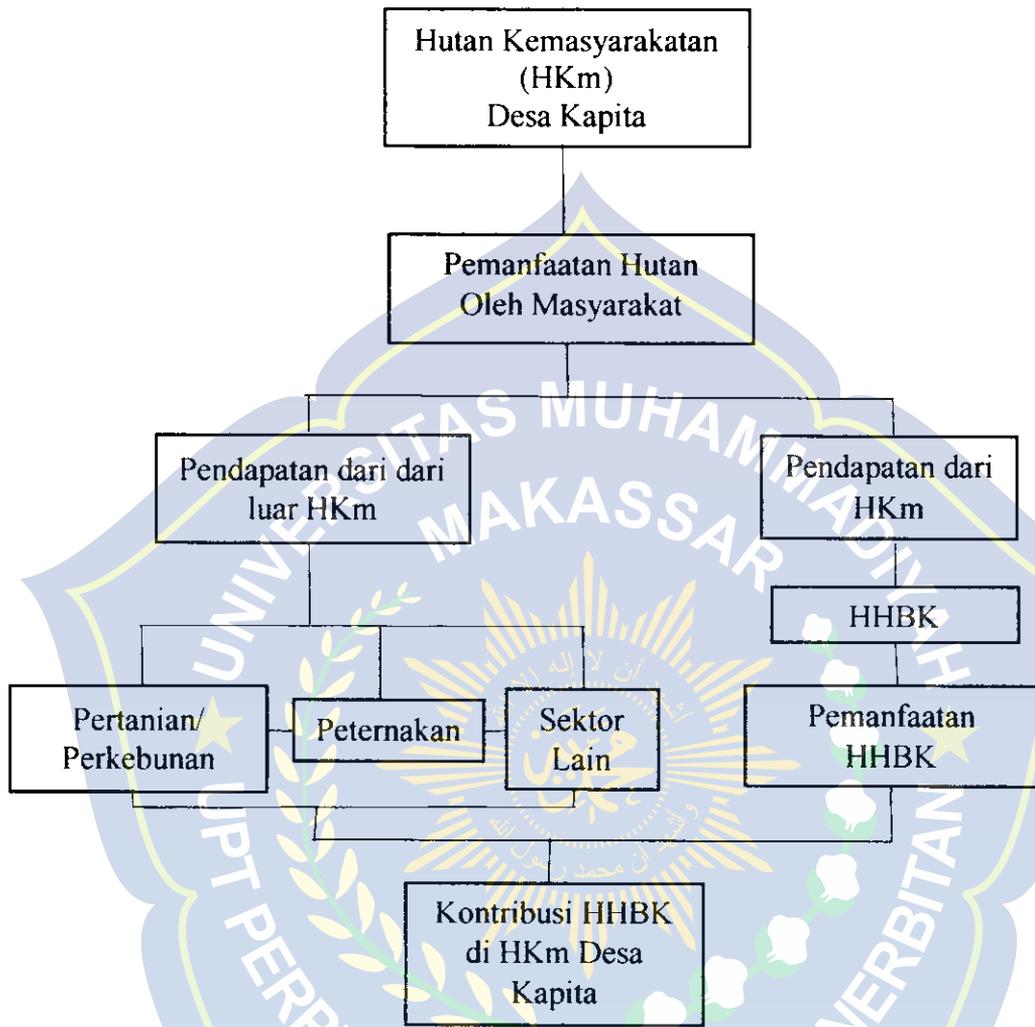
Menurut Departemen Kehutanan (2007) peran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi (daerah penyangga) sebagai user/pemohon, dalam pemanfaatan HHBK dari kawasan konservasi sebagai berikut:

1. Membentuk lembaga/kelompok masyarakat lokal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi (daerah penyangga).
2. Mengajukan permohonan ijin pemanfaatan HHBK dari kawasan konservasi kepada UPT Ditjen PHKA terkait.
3. Membuat rencana (target, volume) pengambilan jenis, untuk periode tertentu.
4. Mengembangkan HHBK secara lestari di daerah penyangga dengan memperhatikan aspek Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Melaporkan kegiatan pemanfaatan HHBK dari kawasan konservasi secara periodik kepada UPT Ditjen PHKA terkait.
6. Alternatif lain untuk pembangunan sektor kehutanan adalah pengembangan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu, karena memiliki potensi yang cukup tinggi. Potensi produktifitas sebagai HHBK cukup tinggi dalam mendukung disertifikasi pendapatan masyarakat. Salah satu kelemahan masyarakat adalah

belum dikuasainya teknologi pemanenan dan pengolahan pasca panen, sehingga menyebabkan banyak HHBK yang tidak dimanfaatkan. karena itu pada masa yang akan datang sangat diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanenan dan diperlukan pasca panen sehingga masyarakat memperoleh hasil dalam jumlah dan kualitas yang memuaskan (Njurumana dan Butarbutar, 2008).

2.7 Kerangka Pikir

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi HHBK di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kapita terhadap pendapatan masyarakat. Kerangka pemikiran penelitian mengenai kontribusi HHBK dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Kontribusi HHBK

III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

3.2 Objek dan Alat Penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kapita yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Alat tulis menulis
2. Kuesioner
3. Alat dokumentasi berupa kamera

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) kelompok tani yang berjumlah 52 orang. Jumlah tersebut sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini sehingga disebut penelitian sensus. (Sugiyono, 2014).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap berbagai kegiatan dan keadaan daerah objek penelitian, baik keadaan lapangan maupun kondisi masyarakat dalam kehidupan.

2. Teknik Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/tanya jawab secara langsung terhadap responden, baik masyarakat desa, tokoh masyarakat serta aparat desa setempat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan/ kuesioner terstruktur dan tidak terstruktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Studi Pustaka

Mencatat dan mempelajari studi literatur yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan mengumpulkan data-data dari instansi terkait.

3.5 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara masing-masing responden, yang meliputi: Data identitas Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Kemasyarakatan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono. Faktor internal meliputi karakteristik anggota kelompok tani pengelolaan HKm yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan formal/non formal, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan dan penghasilan, jarak lahan dengan tempat tinggal, luas pengelolaan lahan, pengalaman berusahatani dan motivasi berusaha.
- b. Data sekunder diperoleh dari Kantor Desa Kapita, Kantor Kecamatan Bangkala. Faktor eksternal berupa modal, penyuluhan kehutanan, kelompok tani hutan, dan sumber informasi.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel dan diagram yang didapat. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Pemanfaatan hutan oleh responden khususnya yang diperoleh dari hasil hutan bukan kayu dapat diketahui dengan menghitung harga perjenis flora dan fauna yang berlaku di masyarakat atau pasar.

Perhitungan kontribusi HHBK tiap jenis oleh responden dihitung dengan menggunakan perhitungan nilai pendapatan yang dikemukakan oleh Ratnaningsih (2006), sebagai berikut :

$$I = TR - TC$$

Keterangan :

I : Total Pendapatan

TR : Total Penerimaan

TC : Total Biaya

1. Pendapatan dari HHBK

a). Pendapatan dari jambu mete

$$P_j = T_j - B_j$$

Keterangan :

P_j : Pendapatan petani dari jambu mete (Rp/kg/tahun)

T_j : Penerimaan dari jambu mete (Rp/kg/tahun)

Bj : Biaya pengelolaan jambu mete (Rp/kg/tahun)

b). Pendapatan dari bambu

$$Pb = Tb - Bb$$

Keterangan:

Pb : Pendapatan petani dari bambu (Rp/batang/tahun)

Tb : Penerimaan dari bambu (Rp/batang/tahun)

Bb : Biaya pengelolaan bambu (Rp/batang/tahun)

c). Pendapatan dari kunyit

$$Pk = Tk - Bk$$

Keterangan :

Pk : Pendapatan petani dari jahe (Rp/kg/tahun)

Tk : Penerimaan dari jahe (Rp/kg/tahun)

Bk : Biaya pengelolaan jahe (Rp/kg/tahun)

d). Pendapatan dari kemiri

$$Pk = Tk - Bk$$

Keterangan :

Pk : Pendapatan petani kemiri (Rp/kg/tahun)

Tk : Penerimaan dari kemiri (Rp/kg/tahun)

Bk : Biaya pengelolaan kemiri (Rp/kg/tahun)

2. Pendapatan dari sumber lain

$$Pn = P1 - B1$$

Keterangan :

P_n : Pendapatan petani dari pekerjaan lain (Rp/tahun)

P_l : Penerimaan petani dari pekerjaan lain (Rp/tahun)

B_l : Biaya (Rp/tahun)

3. Pendapatan total rumah tangga petani

$$P_t = \Sigma P_{hhbk} + \Sigma P_l$$

Keterangan :

P_t : Pendapatan total petani (Rp/ha/tahun)

ΣP_{hhbk} : Jumlah pendapatan petani dari HHBK (Rp/ha/tahun)

ΣP_l : Jumlah pendapatan petani dari sektor lain (Rp/tahun)

4. Kontribusi dari HHBK terhadap pendapatan total petani

$$K_h = \frac{P_{hhbk}}{P_t} \times 100\%$$

Keterangan :

K_h : Kontribusi dari HHBK

P_{hhbk} : Pendapatan petani dari HKm

P_t : Pendapatan total rumah tangga petani

IV KEADAAN UMUM LOKASI

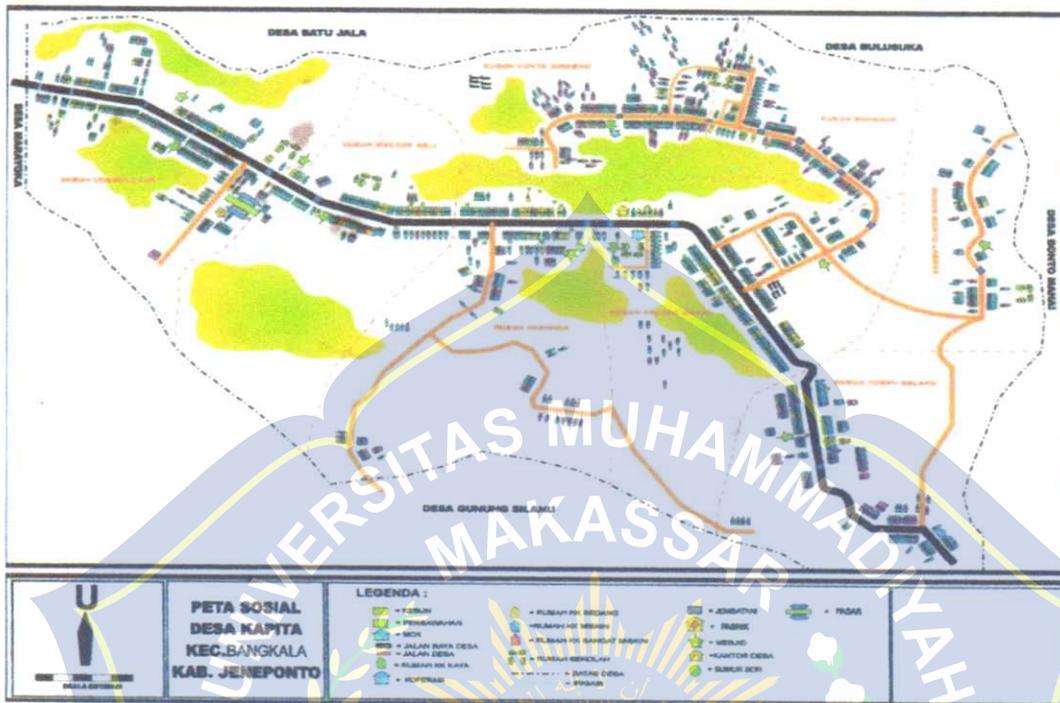
4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Batas-Batas Administrasi

Desa Kapita merupakan satu dari 14 (empat belas) Desa dan Kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marayoka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu Suka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontomanai
- Sebelah Barat berbatasan Desa Gunung Silanu

Desa Kapita terletak disebelah Barat Bonto Sunggu Ibu kota Kabupaten Jeneponto dengan jarak sekitar 39 km yang dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua dan/atau roda empat. Gambaran secara menyeluruh mengenai sketsa peta wilayah Desa Kapita seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sketsa peta wilayah Desa Kapita

4.1.2 Luas Wilayah Administratif

Desa Kapita merupakan salah satu desa yang mempunyai luas wilayah administratif terluas dibanding dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Bangkala. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Kapita yaitu 21, 81 Km² dengan luas Daratan : 625 Hektar

Penggunaan lahan oleh masyarakat Desa Kapita secara alami dapat digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Objek Bangunan Dan Peruntukan Lahan

No	Obyek	Luas	Keterangan
1. PEMUKIMAN DAN BANGUNAN			
1	Umum	-	-
2	Tempat Ibadah		11 Tempat Ibadah
3	Jalan	4,5 Km	1 Km jln primer,3,5 jln. sekunder
4	Pasar	300 m ²	-
5	Sekolah	1 Hm	TK 2, SD 2, SMP 2
6	Kantor Kepala Desa	0,5 Hm	-
7	Lapangan Olahraga	-	-
2. PERTANIAN			
1	Kebun Tradisional	250 Hm	Pekarangan & ladang
2	Tanah Hutan Kemasyarakatan (HKm)	675	-
3	Lahan Perkebunan		-
4	Hutan Lindung	-	-
5	Sawah	-	-

Sumber :Data Pemerintah Desa Kapita Tahun 2020.

Sejak tahun 2015 Desa Kapita terdiri dari 11 wilayah (Dusun). Berdasarkan hasil pembagian wilayah tersebut menempatkan Desa Kapita menjadi desa dengan jumlah pembagian wilayah administratif terbanyak se-Kecamatan Bangkala maupun di Kabupaten Jeneponto. Adapun pembagian wilayah administrasi Desa Kapita dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel. 2. Pembagian Wilayah Administratif Desa Kapita

No	Nama Wilayah/Dusun
1	Dusun Bonto Labbua
2	Dusun Tompo Balang
3	Dusun Kapita
4	Dusun Balang Makkai
5	Dusun Paranga
6	Dusun Maccini Baji
7	Dusun Tombolo Loe
8	Dusun Bonto Baddo
9	Dusun Bonto Biraeng
10	Dusun Pokanga
11	Dusun Bonto Rea

Sumber :Data Pemerintah Desa Kapita Tahun 2020

4.2 Sejarah dan Asal Usul Desa

Desa Kapita terbentuk dari serangkaian kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu seperti tercatat dalam dokumen desa maupun berdasarkan informasi/catatan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat. Estafet kepemimpinan melahirkan tokoh-tokoh masyarakat menjadi pemimpin di desa selama periode proses persiapan wilayah Desa Kapita hingga sampai pada masa demokrasi saat ini.

Adapun sejarah estafet kepemimpinan di Desa Kapita dari periode ke periode dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alur Sejarah Ringkas Desa Kapita

Tahun	Rekaman Kejadian	Keterangan
1960-an	Kapita dibawah pemerintahan Desa Kalimporo	Kepala bori Tama Kr. Tanatoa
1970	Kapita dibawah naungan pemerintahan Desa Pallantikang	Satu wilayah administrasi desa Pallantikang
1983	Menjadi Desa persiapan hasil pemekaran dari Desa Pallantikang	Kepala desa Persiapan Murdini Dg. Bata
1985	Pemilihan kepala Desa yang pertama	Kepala Desa Murdini Dg Bata
1998	Pemilihan Kepala Desa yang kedua	Kepala Desa Muh. Zahir Rauf, S.Ag Dg. Sibali
2002-2007	Pemilihan Kepala Desa yang Ketiga	Kepala Desa Abd. Razad, S.Pd. Dg. Rate
2007-2018	Pemilihan Kepala Desa yang Keempat dan Kelima	Kepala Desa MUH. NUR, S.Hi. Dg. Rowa Kepala Desa Selama Dua Periode
2019-2025	Pemilihan Kepala Desa yang Keenam	Kepala Desa Abd. Razad, S.Pd. Dg Rate

Sumber :Data Pemerintah Desa Kapita Tahun 2020

4.3. Sarana dan Prasarana Umum Desa

Kondisi rumah penduduk yang ada pada umumnya merupakan bangunan rumah panggung dan hanya sebagian kecil dengan bangunan rumah batu, masing-masing wilayah dusun terdapat rumah dinilai kurang layak huni. Disamping itu, juga terdapat sejumlah fasilitas umum dengan kondisi yang tidak/ kurang terpelihara dan tidak berfungsi.

Kondisi sarana dan prasarana umum, terutama sarana perhubungan (jalan dan jembatan) kondisinya kurang terpelihara dan pada bagian tertentu dalam

keadaan rusak. Kerusakan ini antara lain sebagai akibat banjir dikala musim hujan, dimana konstruksi bangunan telah dimakan usia dan belum ada penghalang banjir (bronjong), sehingga menimbulkan kerusakan dan terjadinya genangan air pada ruas sungai bila datang banjir. Genang luapan air sungai Allu - Kapita.

Dengan Kondisi jalan yang rusak sehingga untuk menuju ibu kota kecamatan sebagai pusat administrasi wilayah Bangkala dengan jarak 9 km dengan waktu tempuh 30 menit. Semakin tahun semakin rusak akibat genangan air diwaktu musim hujan, karena pemerintah desa belum mampu untuk memperbaiki jalan. Ini merupakan permasalahan tersendiri karena selain berdampak dalam kerusakan sarana jalan. Untuk menekan akan terjadinya banjir perlu ada reboisasi atau penanaman pepohonan serta menjaga kelesatian lingkungan hidup, diharapkan pemerintah atau instansi terkait dapat menganggarkan agar dapat terlaksanan kegiatan tersebut.

Sarana dan prasarana umum seperti : WC, bak penampung air bersih dan prasarana pasar saat ini dalam kondisi kurang terawat, daya tampung tidak memungkinkan dan rusak atau tidak lagi dimanfaatkan dengan baik. Beberapa WC yang dibangun dalam kondisi rusak dan tidak dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya seperti sumur air serta tidak dimanfaatkan.

Pendidikan dasar (SD) dan MTs berjalan baik, namun pada tingkat lanjutan atas (SLTP/SLTA) dilanjutkan di desa Kalimporo dan Ibu kota Kecamatan Bangkala atau di Ibu kota kabupaten Jeneponto. Biaya transportasi yang dibutuhkan para siswa SLTP dan SLTA menjadi berat, namun niat dan ketulusan hati para siswa semangat menuntut ilmu tidak pernah surut demi untuk

membangun tanah kelahirannya kedepan. Sarana penerangan untuk pemukiman cukup tersedia namun masih ada 282 warga yang tidak memiliki listrik dan 756 warga menumpang dari tetangga. Sedangkan penerangan jalan pada umum tersedia dan masih perlu ada penambahan/mendapatkan perhatian dari pemerintah agar masyarakat merasa nyaman dan anak-anak dapat belajar pada malam.

4.3.1 Bangunan Pemerintah Desa

Saat ini Pemerintah Desa memiliki beberapa bangunan yang dimiliki yaitu :

1. Kantor Pemerintah Desa
2. Pasar Desa.
3. Balai Penimbangan Balita/Balai Pos Yandu.
4. Pustu
5. Puskesmas

4.3.2 Bangunan Sekolah

1. TK Addariyah (darurat)
2. PAUD Baji Pa'mae (darurat)
3. RA Tombolo loe (darurat)
4. TK DD Bonto Ba'ddo (darurat)
5. SD Negeri 36 Kapita.
6. SD Negeri 255 Maccini Baji
7. SDI Bonto La'bbua
8. MI Pokanga.
9. MI Kapita
10. MI Tompo Balang

11. MTs Negeri Kapita

4.3.3 Jalan Desa

Jalan Desa terdiri atas 2 buah kategori :

1. Jalan Primer/Jalan Protokol, sepanjang 6,5 km.
2. Jalan Sekunder/Jalan Desa, sepanjang 4,5 km.

4.4 Kelembagaan desa

Di desa Kapita terdapat sejumlah organisasi dan lembaga, baik formal maupun non-formal, yang mempunyai peran dan fungsi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan masing-masing organisasi atau lembaga tersebut dibedakan atas : (i) organisasi/lembaga yang dibentuk atas inisiatif murni masyarakat guna memenuhi kepentingan masyarakat, (ii) organisasi/lembaga yang muncul dan tumbuh atas inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional dan finansial oleh pihak luar, dan (iii) organisasi/lembaga yang merupakan bentukan pihak luar yang inisiatif pembentukan tidak berasal dari masyarakat.

Bagan hubungan kelembagaan yang ada di Desa Kapita digambarkan dalam diagram Venn berikut, yang difokuskan pada kajian hubungan antar lembaga tingkat lokal (desa) untuk menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh dan dekatnya hubungan masing-masing organisasi/lembaga tersebut dengan masyarakat.

Terdapat kurang lebih 10 lembaga/organisasi di Desa Kapita :

1. Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

5. Karang Taruna.
6. Posyandu.
7. Remaja Masjid. (BKPRMI)
8. Majelis Taklim.
9. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
10. Kelompok Keaksaran Fungsional

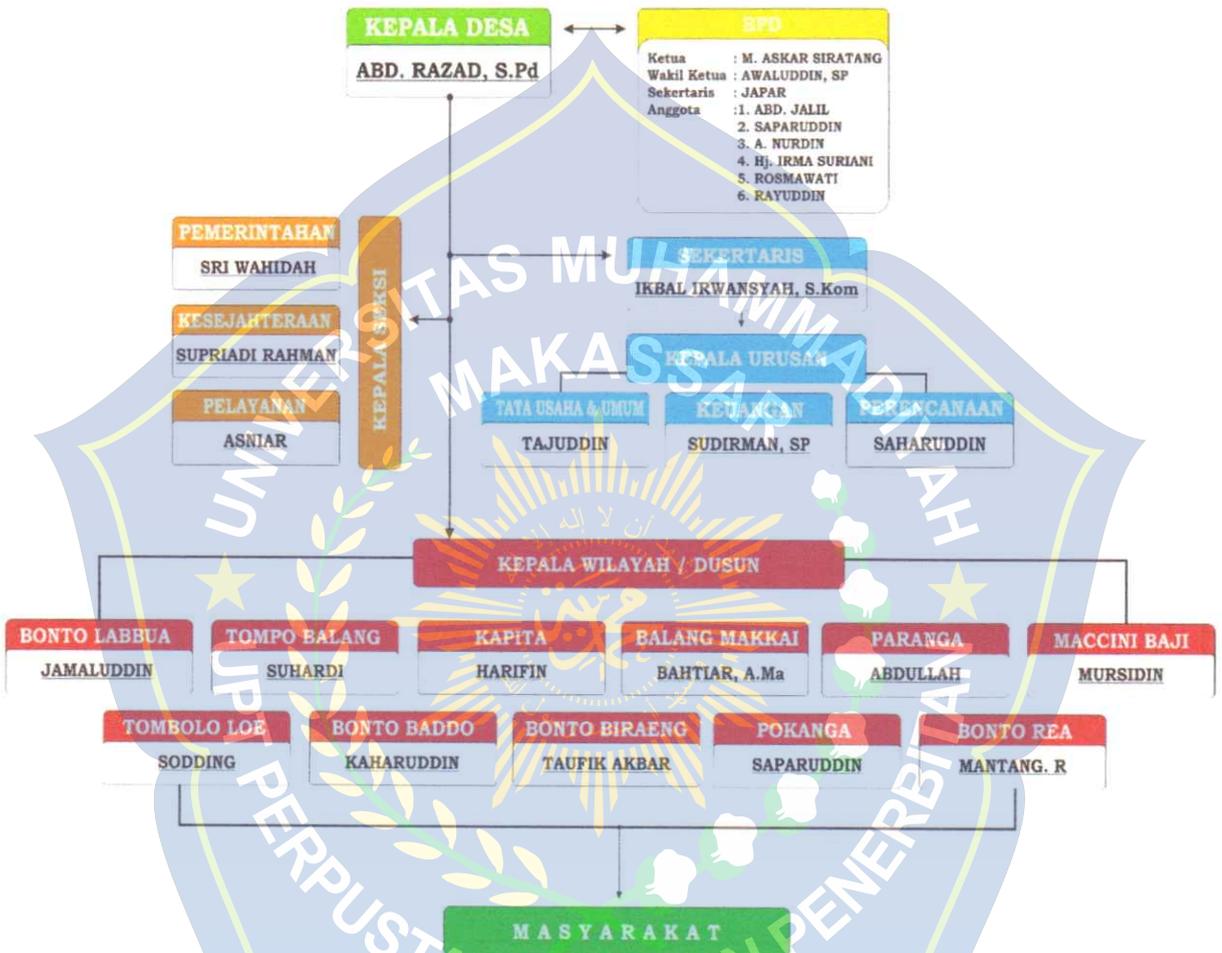
Hubungan Kelembagaan Desa :



Gambar 3. Hubungan Kelembagaan Desa

4.5 Struktur organisasi Pemerintah Desa Kapita Tahun 2020

STRUKTUR ORGANISASI DESA TAHUN 2020



Gambar 4. Struktur Organisasi Desa

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Petani Hutan Kemasyarakatan

Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik petani hutan kemasyarakatan dilakukan wawancara terhadap 52 orang responden dari 2 kelompok Tani yang ada di desa Kapita yang meliputi identitas, umur dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Umur

Berdasarkan data yang dikumpulkan, umur responden yang paling muda adalah 39 tahun dan yang paling tua berumur 76 tahun. Data mengenai umur responden dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Umur Responden di Desa Kapita

No	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	36-45	5	9,61
2.	46-55	16	30,76
3.	56-65	12	23,07
4.	66-75	18	34,61
5.	75≤	1	1,92
Jumlah		52	100

Sumber data: Data Primer, 2021

Tabel 4 menunjukkan persentase umur responden terbesar berada pada selang umur 66-75 tahun sebesar 34,61%. Hal ini disebabkan pada rentang umur tersebut responden masuk pada kategori telah berkeluarga dan mempunyai anak serta merupakan generasi sebagai pewaris lahan. Adanya responden yang berusia muda menunjukkan bahwa pada dasarnya lahan hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Kapita merupakan lahan turun temurun yang dalam proses pengelolaannya juga turun temurun ke generasi berikutnya.

5.1.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir petani dalam mengelola lahan yang dimilikinya. Kebanyakan dari petani atau dalam hal ini diwakili oleh responden, belum mampu mengaplikasikan pengelolaan lahannya secara lestari, dalam artian belum ada usaha yang dilakukan oleh petani untuk bisa menanggulangi problem yang akan dihadapi bila tanaman mereka memasuki masa tidak produktif lagi. Berdasarkan proses wawancara yang dilakukan selama penelitian, para petani seolah berada dalam zona aman dan nyaman ketika saat ini mereka tidak membutuhkan modal untuk mengelolah lahan dikarenakan lahan garapan mereka merupakan warisan dari generasi sebelumnya yang juga mewariskan tanaman yang sedang dalam masa produktif.

Tingkat pendidikan dapat juga menjadi indikator status sosial dalam masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula status sosialnya di dalam masyarakat tersebut. Data tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Kapita

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak bersekolah	17	32,69
2.	SD	15	28,84
3.	SMP	11	21,15
4.	SMA	9	17,30
5.	Sarjana	-	-
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer, 2021

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang (28,84%) responden dengan tingkat pendidikan hanya sampai tingkat SD dan sebanyak 17 orang

(32,69%) tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan dipicu oleh besarnya biaya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain itu juga fasilitas pendidikan pada tingkat lanjutan yang ada di wilayah Desa Kapita baru tersedia beberapa tahun terakhir.

Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan keterbatasan kemampuan apalagi disertai dengan tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga kebanyakan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya adalah dengan meneruskan kelola lahan yang telah diwariskan atau pergi keluar desa untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Tingkat pendidikan sendiri tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pendapatan responden melainkan terhadap cara responden dalam merespon pasar atau pun kebutuhan kemudian mengaplikasikannya pada lahan mereka.

5.2 Pendapatan Petani dari HKm

Pendapatan petani dari HKm dihitung dari penjualan jambu mete, bambu, kunyit dan kemiri. Pendapatan petani dihitung dalam jangka waktu satu tahun terakhir berdasarkan hasil penjualan HHBK. Data pendapatan petani dari HKm disajikan pada Tabel 6.